

HANDOUT MATA KULIAH
PENGANTAR ILMU EKONOMI

Anang Muftiadi, SE., M.Si.

Jurusan Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

HANDOUT - 9
**KEBIJAKAN
FISKAL DAN MONETER**

Tujuan:

1. Memahami peran pemerintah dalam perekonomian
2. Memahami efek karakteristik kebijakan Fiskal Pemerintah terhadap Bisnis
3. Memahami efek karakteristik kebijakan Moneter Pemerintah terhadap Bisnis

Hand out #9#

Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh terhadap perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam perekonomian.

Negara yang peran pemerintahnya hanya sebagai pendukung dalam perekonomian umumnya disebut dengan **Negara Kapitalis** dan negara yang secara intensif mengatur ekonominya disebut dengan **Negara Komando** (Sentralized). Bagaimanapun peran negara tersebut dalam perekonomian, maka dunia bisnis akan selalu memperhitungkan dampak peran pemerintah terhadap bisnisnya.

Beberapa *contoh peran pemerintah* dalam perekonomian;

1. Pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum
2. Pemerintah mendorong persaingan usaha yang sehat
3. Pemerintah membantu kelompok ekonomi lemah
4. Pemerintah menjadi produsen untuk produk yang tidak disediakan oleh pasar atau yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat banyak
5. Pemerintah sebagai Stabilizer

Sejauhmana peran Pemerintah dilakukan terhadap perekonomian (Prinsip Peran Pemerintah)?

1. Pemerintah selalu menjaga jarak untuk menjadi produsen dalam suatu perekonomian, apabila usaha swasta sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Bila pemerintah membutuhkan produk barang atau jasa, maka bila memungkinkan harus dipenuhi oleh fasilitas dan kapabilitas dunia bisnis yang ada.
3. Bila pemerintah memerlukan produk jasa, sepatutnya produk jasa tersebut diperoleh secara lokal bila memungkinkan (layak).
4. Produk barang atau jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar dapat disediakan oleh Pemerintah apabila rakyat menghendaknya.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKONOMI

ASPEK	FISKAL	MONETER
Lokus Kebijakan	Melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah	Melalui Lembaga Keuangan (Bank Sentral)
Bentuk Kebijakan	Aktivitas pemerintah yang dituangkan dalam: 1. Belanja Pemerintah 2. Penerimaan Pemerintah	Aktivitas pemerintah melalui <i>pengendalian jumlah uang beredar</i> dan tingkat harga-harga umum
Contoh Titik kritis yang penting diamati oleh Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan pengenaan pajak oleh Pemerintah kepada individu dan bisnis • Kecenderungan proporsi belanja pemerintah untuk barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan pemerintah untuk merubah suku bunga. • Kecenderungan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.
UNTUK KONDISI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan bertingkat-tingkat; Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota. • Anggaran pemerintah juga bertingkat; pusat-daerah dan dikelola secara otonom 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan ada di Pemerintah Pusat



KEBIJAKAN FISKAL

ANGGARAN PEMERINTAH	URAIAN
SUMBER PENERIMAAN	<ul style="list-style-type: none">• Pajak• Pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam• Keuntungan dari unit usaha pemerintah• Pinjaman <p>Perhatikan komposisi penerimaan pemerintah, bagaimana dampaknya kepada dunia bisnis?</p>
ALOKASI BELANJA	<ul style="list-style-type: none">• Belanja rutin kepegawaian dan operasional• Belanja investasi / pembangunan <p>Perhatikan komposisi dan bentuk belanja pemerintah, bagaimana dampaknya kepada dunia bisnis?</p>

Prinsip-prinsip pengenaan Pajak yang adil (fair):

1. Kemanfaatan yang diterima oleh pembayar pajak (benefits received)
2. Kemampuan membayar (ability to pay)
3. Pengaruh terhadap produksi (bisnis) - (effect on production)
4. Pengaruh terhadap barang tertentu (effect on specific goods)
5. Cerminan nilai barang/jasa (reflections of values)
6. Kemudahan (convenience)
7. Pemindahan beban pajak (shifting the burden)

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter diimplementasikan melalui lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai *intermediator* (penghubung) antara masyarakat/bisnis dengan Pemerintah (Bank Sentral)

Lembaga Keuangan	Fungsi
Bank	1. Penyimpanan (depositories) 2. Peminjaman (lending) 3. Pembentukan uang (money creation)
Non-Bank	4. Penyimpanan (saving) 5. Personal trusts 6. Asuransi 7. Kredit konsumen 8. Fungsi lain

TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER TERHADAP BISNIS

INSTRUMEN	URAIAN
Diskonto (Discount Rate)	<p>Kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral melalui sistem perbankan. Semakin tinggi tingkat suku bunga bank sentral, maka akan semakin membuat bank umum menyimpan dananya di Bank Sentral dan mengurangi jumlah uang yang akan dipinjamkan kepada masyarakat dan bisnis.</p> <p><i>Bila pemerintah cenderung melihat dunia usaha lesu, maka suku bunga ini diturunkan. Penurunan suku bunga ini akan mendorong bank umum untuk menarik simpanan/cadangannya di Bank Sentral dan meminjamkan kepada dunia bisnis (karena lebih menguntungkan meminjamkan dana kepada dunia bisnis daripada menyimpan di Bank Sentral). Dunia bisnis bergairah lagi karena bunga pinjamanpun akan menurun.</i></p>
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)	<p>Kebijakan moneter melalui penjualan dan pembelian Surat Berharga Pemerintah (Government Securities). Bila pemerintah mengeluarkan surat berharga dengan tingkat suku bunga yang menarik, maka masyarakat/bank akan tertarik dan membeli surat berharga tersebut. Dampaknya jumlah uang yang beredar di berkurang.</p> <p><i>Bila pemerintah cenderung melihat jumlah uang beredar meningkat terlalu cepat dan cenderung akan memunculkan inflasi, maka pemerintah menjual Surat Berharga Pemerintah (obligasi) dan memberikan sejumlah bunga/return kepada pembeli.</i></p>

INSTRUMEN	URAIAN
Cadangan (Reserve Requirements)	<p>Kebijakan moneter melalui penentuan cadangan bank-bank umum yang harus disimpan di Bank Sentral. Semakin besar cadangan yang disimpan bank umum, maka semakin sedikit dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat dan bisnis, sehingga jumlah uang beredar semakin berkurang.</p> <p><i>Bila pemerintah cenderung melihat jumlah uang beredar meningkat terlalu cepat dan cenderung akan memunculkan inflasi, maka pemerintah menetapkan reserve requirement bank-bank umum ditingkatkan, misalnya dari 5% menjadi 10%. Peningkatan ini menyebabkan kredit yang dapat diberikan oleh Bank umum kepada masyarakat/bisnis semakin berkurang secara kuantitas. Dengan demikian jumlah uang beredar akan berkurang.</i></p>
Margin Requirements	Kebijakan moneter yang dikenakan pada pembeli saham, yaitu persentase tertentu dari harga saham yang dibeli oleh investor.
Himbauan moral (moral suation)	Bank sentral menghimbau perbankan dan masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang direkomendasikan oleh Pemerintah.
Temporary Powers	Dalam kondisi tertentu (kondisi kritis/gawat) pemerintah bisa menunjukkan kekuatannya mengendalikan keuangan untuk memperbaiki kondisi perekonomian, politik dsb.